

PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL DINAS KESEHATAN TERHADAP PENANGANAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DI BANDA ACEH

Muhammad Fathin Hafizd¹ Hanifah Nurdin² Muhammad Aminullah³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry^{1,2,3}

210401033@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Media digital memiliki peran strategis dalam komunikasi kesehatan publik, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai Human Immunodeficiency Virus (HIV). Namun, efektivitas komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform, melainkan juga oleh perencanaan strategis, kolaborasi internal, dan keberlanjutan pesan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam komunikasi HIV kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas penanggung jawab program HIV dan pengelola media digital di lingkungan Dinas Kesehatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital belum optimal akibat kurangnya konsistensi dan keberlanjutan konten, sehingga isu HIV belum terbangun sebagai agenda komunikasi kesehatan yang kuat di ruang publik. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan antara pengelola program dan pengelola media digital menjadi hambatan struktural dalam penyusunan pesan. Pemisahan peran tersebut menyebabkan komunikasi cenderung informatif dan normatif, serta belum mengedepankan strategi kolaboratif dan persuasif. Diperlukan perencanaan komunikasi digital jangka panjang dan kolaborasi lintas bidang untuk meningkatkan literasi kesehatan serta meminimalkan stigma terhadap penyintas HIV.

Kata Kunci: HIV/AIDS; Media Digital; Dinas Kesehatan; Banda Aceh

THE USE OF DIGITAL MEDIA BY THE HEALTH DEPARTMENT IN THE MANAGEMENT OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS IN BANDA ACEH

ABSTRACT

Digital media play a strategic role in public health communication, particularly in disseminating information about Human Immunodeficiency Virus (HIV). However, the effectiveness of digital communication is not solely determined by the availability of platforms, but also by strategic planning, internal collaboration, and message sustainability. This study aims to analyze the utilization of digital media by the Banda Aceh City Health Office in communicating HIV-related information to the public. The research employed a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation. Informants consisted of the HIV program coordinator and digital media managers within the Health Office. Data were analyzed through data reduction, data display, and thematic conclusion drawing. The findings reveal that the use of digital media has not been optimal due to the lack of content consistency and continuity, resulting in HIV not being established as a strong public health communication agenda in the public sphere. Differences in educational backgrounds between program managers and digital media administrators also constitute structural barriers in message development. This separation of roles leads to communication that is primarily informative and normative, lacking collaborative and persuasive strategies. Long-term digital communication planning and cross-sector collaboration are necessary to enhance health literacy while minimizing stigma toward people living with HIV.

Keywords: HIV/AIDS; Digital Media; Banda Aceh

PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) masih menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat global karena hingga saat ini belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan secara total. Data WHO tahun 2023 mencatat lebih dari 39 juta orang hidup dengan HIV di seluruh dunia, dengan kasus baru yang terus bertambah setiap hari. Infeksi HIV yang tidak ditangani secara komprehensif dapat berkembang menjadi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), yaitu

kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menurun drastis dan tidak lagi mampu melindungi diri dari penyakit.

Di tingkat nasional, Indonesia juga menghadapi peningkatan kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun. Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan ribuan kasus baru, menandakan bahwa penanganan HIV/AIDS belum sepenuhnya efektif. Tantangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah, termasuk Aceh yang kini berada dalam situasi darurat HIV.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh tahun 2023, tercatat 123 kasus HIV dan 36 kasus AIDS dalam periode Januari hingga Juni 2023. Kota Banda Aceh menjadi wilayah dengan jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tertinggi, yaitu sebanyak 49 kasus. Tingginya angka kasus HIV menuntut adanya strategi komunikasi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan, di mana media digital dan media sosial menjadi sumber utama pencarian informasi. Oleh karena itu, media digital pemerintah memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi, peningkatan kesadaran publik, serta pengurangan stigma terhadap ODHA (Safitri et al., 2025). Dalam konteks ini, media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi yang edukatif, preventif, dan responsif terhadap isu HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti terhadap media digital resmi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, intensitas penyampaian informasi terkait HIV/AIDS masih tergolong rendah. Pada akun Instagram resmi @dinkeskotabandaaceh selama periode 2024–2025, hanya ditemukan satu unggahan yang secara khusus membahas HIV/AIDS, sementara konten kesehatan lainnya didominasi oleh tema pelayanan kesehatan umum, imunisasi, dan penyakit tidak menular. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi konten HIV/AIDS belum sebanding dengan urgensi persoalan HIV di Kota Banda Aceh yang mencatat jumlah ODHA tertinggi di Provinsi Aceh. Keterbatasan intensitas dan variasi konten ini berpotensi membatasi jangkauan edukasi serta pemahaman masyarakat terhadap informasi HIV/AIDS yang komprehensif.

Ketiadaan strategi komunikasi digital yang efektif dapat berdampak pada melemahnya akses literasi kesehatan masyarakat dan kegagalan kampanye pencegahan HIV. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait bentuk pemanfaatan dan efektivitas media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menangani masalah HIV seperti yang disampaikan oleh (Solihin et al., 2023) dalam bukunya. Evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa jauh media digital mampu mencapai target audiens, mengubah persepsi masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku yang mendukung kesehatan.

Dengan demikian, penelitian mengenai *Pemanfaatan Media Digital Dinas Kesehatan terhadap Penanganan Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Banda Aceh* menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi teoritis dalam kajian komunikasi kesehatan berbasis digital, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi optimalisasi strategi komunikasi Dinas Kesehatan. Pada lingkup sosial, penelitian ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma terhadap ODHA, dan memperluas budaya literasi digital kesehatan. Menurut (Harmita et al., 2022) Jika media digital akhirnya dapat menjadi garda terdepan dalam kampanye penanganan HIV di Banda Aceh, maka upaya edukasi kesehatan bukan sekadar hadir “sekali setahun saat Hari AIDS Sedunia,” tetapi menjadi instrumen komunikasi publik yang bekerja setiap hari untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis, menggunakan metode tersebut karena kan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai situasi, objek dan kondisi yang akan diteliti (Ramdhan, 2021). Metode deskriptif analisis berguna untuk menelaah bagaimana media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang digunakan guna menyebarkan, menyampaikan informasi terkait HIV/AIDS, dan bagaimana efektifitas dan kekurangannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam, (Rukin, 2019). Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan dan publikasi konten pada platform digital Dinas Kesehatan guna memperoleh gambaran empiris mengenai pola komunikasi kesehatan terkait HIV. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip digital, laporan program, serta materi kampanye kesehatan HIV sebagai penguat data. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang terdiri atas pejabat dan staf Dinas Kesehatan Banda Aceh.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data prime dan data sekunder. Data prime yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yaitu dengan divisi pengelolaan dan penyebaran informasi media digital. Untuk data sekunder akan di lihat dan kumpulkan melalui dokumentasi dan unggahan konten di akun instagram dan youtube resmi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Rukajat, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan seluruh data mentah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai fokus penelitian. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi pola pemanfaatan media digital oleh Dinas Kesehatan Banda Aceh dalam penanganan HIV sehingga hanya data yang relevan digunakan dalam analisis lanjutan.

Tahap berikutnya adalah penyajian data yang dilakukan dengan mengorganisasikan informasi secara sistematis ke dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi bagan dan tabel. Penyajian ini membantu memperjelas keterkaitan antar-kategori seperti efektivitas media digital dalam penyebaran informasi kesehatan, edukasi masyarakat, serta respons publik terkait program penanganan HIV di Banda Aceh, sehingga memudahkan proses interpretasi dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Media Digital yang Belum Optimal dalam Isu HIV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam penyebaran informasi HIV masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ketidakkonsistenan penggunaan berbagai platform digital yang dimiliki. Pada kanal YouTube resmi Dinas Kesehatan, unggahan terakhir dilakukan sekitar dua tahun yang lalu dan tidak ditemukan konten khusus yang membahas isu HIV/AIDS. Sementara itu, pada platform TikTok belum terdapat unggahan yang memuat informasi mengenai HIV, meskipun platform tersebut memiliki potensi besar dalam menjangkau kelompok usia muda.

Informasi mengenai HIV/AIDS hanya ditemukan pada akun Instagram dan website resmi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Namun, jumlah konten yang dipublikasikan sangat terbatas dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu HIV belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai materi komunikasi kesehatan digital lintas platform, sehingga jangkauan informasi HIV kepada masyarakat menjadi sempit dan tidak merata.

Meskipun demikian, media digital tetap dipandang memiliki peran penting sebagai pintu awal interaksi antara masyarakat dan layanan kesehatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengelola program HIV:

“Berdasarkan pengalaman di lapangan, media digital memiliki peran yang sangat penting. Hampir seluruh proses awal pertemuan dalam kasus HIV/AIDS itu berawal dari media digital, khususnya melalui aplikasi percakapan dan media sosial.” (Elfi Farisma, wawancara 12 Januari 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemanfaatan platform digital belum optimal, media digital tetap menjadi sarana awal yang strategis dalam proses penanganan kasus HIV di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian memperkuat teori Agenda Setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw, yang menyatakan bahwa media memiliki peran strategis dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Penetapan isu HIV sebagai agenda komunikasi terlihat dari pemilihan topik, intensitas penyampaian pada momentum tertentu, serta bentuk penyajian pesan yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Informan menegaskan bahwa pengangkatan isu HIV dilakukan secara berkala dan penuh kehati-hatian agar tidak memicu stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat.

Temuan penelitian sesuai dengan agenda setting tingkat pertama, yakni penentuan isu apa yang perlu mendapatkan perhatian publik. Media digital Dinas Kesehatan tidak secara langsung mengarahkan opini masyarakat, tetapi memposisikan HIV sebagai isu kesehatan yang penting untuk dipahami dan disadari oleh publik. Selain penentuan isu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik agenda setting tingkat kedua, yaitu menonjolkan atribut atau cara isu disajikan kepada publik. Dalam hal ini, HIV tidak dipresentasikan sebagai isu moral atau sosial semata, melainkan sebagai persoalan kesehatan yang dapat dicegah dan ditangani secara medis.

Pendekatan teori agenda setting cocok dengan konteks sosial Banda Aceh yang memiliki nilai agama dan adat yang kuat, sehingga menonjolkan isu dilakukan secara selektif dan beretika (Efendi et al., 2023). Dengan demikian, media digital berperan bukan hanya menentukan apa yang dipikirkan masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami isu HIV.

Media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berperan sebagai sumber informasi resmi yang dipercaya publik, salah satunya melalui akun Instagram resmi @dinkeskotabandaaceh dengan nama tampilan *Dinkes Kota Banda Aceh*. Akun ini digunakan sebagai saluran utama komunikasi kesehatan digital dan hingga periode penelitian telah mempublikasikan 451 unggahan, memiliki 4.622 pengikut, serta mengikuti 95 akun lainnya. Kejelasan identitas sebagai akun resmi pemerintah dan konsistensi publikasi konten kesehatan memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan. Kondisi ini mendukung efektivitas agenda setting, karena pesan yang berasal dari institusi yang kredibel dan terverifikasi lebih mudah diterima serta dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan publik terhadap akun resmi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menjadi modal penting dalam membangun komunikasi kesehatan yang berkelanjutan, khususnya dalam penyampaian isu sensitif seperti HIV yang memerlukan akurasi informasi dan pendekatan etis.

Selain teori agenda setting, hasil penelitian juga berkaitan dengan teori framing, yang menjelaskan bagaimana media membingkai isu tertentu (Ardhana et al., 2025). Meskipun agenda setting menentukan isu HIV sebagai agenda penting, framing menentukan cara isu tersebut dikemas.

Pemanfaatan media digital dalam penyebaran informasi HIV juga dapat dijelaskan melalui teori difusi inovasi (Rogers) (Feni Evi Andini, 2022). Media digital berfungsi sebagai saluran komunikasi yang mempercepat penyebaran informasi baru terkait HIV, seperti prosedur screening, layanan VCT,

dan terapi antiretroviral. Melalui media digital, informasi kesehatan dapat menjangkau kelompok usia produktif dan populasi kunci secara lebih efektif.

Perbedaan Latar Belakang Pendidikan antara Penanggung Jawab Program HIV dan Pengelola Media Digital

Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan kompetensi antara penanggung jawab program HIV dengan pengelola media digital. Penanggung jawab program HIV berada di bawah bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan latar belakang keilmuan kesehatan, sedangkan pengelola media digital berasal dari bidang yang berfokus pada teknis komunikasi dan pengelolaan media.

Dalam praktik lapangannya, pengelola media digital tidak terlibat dalam penyusunan substansi pesan kesehatan, melainkan hanya bertugas merancang tampilan visual dan mempublikasikan informasi yang telah disusun oleh bidang P2P. Hal ini menyebabkan proses komunikasi bersifat satu arah dan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh bidang teknis kesehatan. Kondisi tersebut ditegaskan oleh informan dari bagian media:

“Dalam merancang pesan, kami bagian media hanya meneruskan informasi yang diberikan bidang terkait kepada kami untuk dipublikasi, jadi isi dari pesan tersebut bukan dari kami, kami hanya merancang dan publikasi.” (Nainunis, wawancara 9 Januari 2026)

Lebih lanjut, ia menjelaskan alur produksi konten:

“Proses di balik satu konten, bidang terkait mengirimkan bentuk pesan, informasi, dan narasi kepada kami, dalam hal ini bidang P2P yang menangani HIV, lalu kami mendesain pesan atau konten tersebut menjadi menarik dan mudah dipahami publik, lalu diunggah ke media digital dinas setelah dilakukan peninjauan ulang.” (Nainunis, wawancara 9 Januari 2026)

Perbedaan latar belakang pendidikan antara penanggung jawab program HIV dan pengelola media digital adalah temuan penting yang menandakan adanya pembagian kerja yang bersifat struktural dalam organisasi Dinas Kesehatan. Penanggung jawab program HIV memiliki latar belakang keilmuan kesehatan dan berfokus pada aspek medis, epidemiologis, serta teknis penanganan penyakit. Sementara itu, pengelola media digital lebih berorientasi pada aspek teknis komunikasi, desain visual, dan distribusi informasi melalui platform digital. Perbedaan ini menunjukkan adanya pemisahan peran yang jelas antara penyusun substansi pesan dan pelaksana teknis komunikasi.

Dalam teori komunikasi, efektivitas pesan sangat ditentukan oleh integrasi antara akurasi medis dan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens (Djurkalem et al., 2021). Pesan kesehatan tidak hanya dituntut benar secara ilmiah, tetapi juga harus mampu dipahami, diterima, dan mendorong perubahan sikap serta perilaku masyarakat.

Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang dialog dan kolaborasi dalam proses produksi pesan kesehatan. Pengelola media digital tidak memiliki keleluasaan untuk memberikan masukan terkait gaya bahasa, pendekatan persuasif, atau strategi penyampaian yang lebih sesuai dengan dinamika media sosial. Akibatnya, pesan HIV berpotensi disampaikan secara normatif dan informatif semata, tanpa penguatan aspek komunikatif yang dapat menjangkau emosi, empati, dan kesadaran kritis masyarakat.

Dalam kajian komunikasi organisasi, situasi ini dapat dipahami sebagai bentuk hambatan struktural, yaitu hambatan yang muncul akibat pembagian tugas, hierarki, dan alur kerja yang kaku antarbidang (Harivarmam, 2017). Hambatan struktural semacam ini sering kali menyebabkan terjadinya sekat komunikasi internal, di mana masing-masing unit bekerja berdasarkan fungsi masing-masing tanpa integrasi yang optimal.

Ketika pesan HIV dirancang tanpa keterlibatan aktif pengelola media dalam tahap konseptual, maka potensi media digital sebagai ruang edukasi dialogis dan persuasif menjadi kurang dimanfaatkan (Bachtiar et al., 2025). Sehingga menyebabkan Media digital hanya berfungsi sebatas sebagai sarana penyebaran informasi, bukan sebagai alat komunikasi strategis yang mampu membangun pemahaman mendalam dan perubahan perilaku masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan, apabila tidak diimbangi dengan kolaborasi yang kuat, dapat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi komunikasi kesehatan digital.

Sensitivitas Isu HIV dan Upaya Menghindari Stigma terhadap Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu HIV dipandang sebagai isu yang sangat sensitif sehingga memengaruhi cara penyampaian pesan di media digital. Informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan bentuk penyederhanaan dari materi kesehatan yang lebih teknis, karena tidak semua istilah dan konsep medis dapat dipahami oleh masyarakat umum.

Pengelola media digital menegaskan bahwa tidak seluruh informasi penanganan HIV disampaikan kepada publik:

“Namun ada beberapa hal tentang penanganan HIV itu tidak disebarkan semuanya kepada publik, mengingat beberapa informasi hanya dimengerti oleh tenaga kesehatan, jadi konten yang kami sajikan hanya versi rangkuman dan mudah dipahami.” (Nainunis, wawancara 9 Januari 2026)

Penyederhanaan pesan ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah munculnya stigma negatif terhadap penyintas HIV maupun kelompok tertentu di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pengelola program HIV:

“Isu HIV/AIDS merupakan isu yang sangat sensitif karena masih kuatnya stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, nilai utama yang dijaga adalah etika, norma agama, adat istiadat, serta penghormatan terhadap martabat individu.” (Elfi Farisma, wawancara 12 Januari 2026)

Selain itu, media digital juga digunakan sebagai sarana untuk meluruskan pemahaman keliru masyarakat terkait HIV:

“Sebagian masyarakat masih menganggap HIV dapat menular melalui tinggal serumah, menggunakan kamar mandi bersama, berenang, atau makan bersama. Padahal itu tidak benar. Media digital membantu meluruskan pemahaman ini, meskipun prosesnya masih membutuhkan waktu.” (Elfi Farisma, wawancara 12 Januari 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam penyampaian pesan menjadi strategi utama untuk menghindari stigma sosial, meskipun berdampak pada keterbatasan kedalaman informasi yang diterima masyarakat.

Dalam buku yang ditulis oleh (Mulyana, 2002) menjelaskan teori framing, media tidak hanya menentukan isu apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana isu tersebut dikonstruksi dan dimaknai oleh publik. Framing memengaruhi cara audiens memahami realitas sosial, termasuk dalam memaknai HIV.

Pendekatan framing yang hati-hati menjadi sangat cocok dalam masyarakat yang masih memandang HIV sebagai isu moral dan tabu (Wibisono, 2021). Oleh karena itu, media digital pemerintah cenderung menggunakan narasi normatif dan edukatif yang menekankan aspek kesehatan, pencegahan, dan layanan, tanpa menonjolkan identitas kelompok atau perilaku tertentu yang dapat memicu stigma.

Framing yang terlalu normatif dapat membatasi fungsi media digital sebagai ruang dialog dan edukasi kritis. Media digital seharusnya mampu membuka ruang diskusi yang sehat, meluruskan miskonsepsi, dan mendorong empati sosial terhadap penyintas HIV (Kristiani et al., 2025). Ketika

framing terlalu dikendalikan oleh kekhawatiran akan stigma, potensi media digital untuk membangun kesadaran sosial yang lebih mendalam menjadi kurang optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan media digital Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam penanganan isu HIV telah berjalan secara fungsional, namun belum optimal dan strategis. Media digital masih digunakan sebatas penyampaian informasi dan pintu awal layanan, belum sebagai instrumen komunikasi kesehatan yang terencana dan berkelanjutan.

Pemanfaatannya juga belum konsisten dari sisi platform, pesan, dan kesinambungan, sehingga isu HIV belum menjadi agenda komunikasi publik yang kuat. Perbedaan latar belakang antara penanggung jawab program HIV dan pengelola media digital turut menjadi hambatan struktural, menyebabkan pesan cenderung informatif-normatif tanpa strategi komunikasi yang kolaboratif dan persuasif.

Penyampaian pesan yang disederhanakan untuk menghindari stigma memang relevan secara etis, namun berpotensi membatasi pemahaman masyarakat. Ditambah ketiadaan strategi digital yang berkelanjutan, komunikasi HIV menjadi reaktif dan berbasis momentum. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi media digital memerlukan perencanaan strategis, kolaborasi lintas bidang, dan kesinambungan pesan agar mampu membentuk literasi kesehatan, mengurangi stigma, dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prasetya, A. E., Lutfiah, R. M., Nugroho, S., Zulfa, N. I., Idamatussilmi, V., Ismail, A. F., Anggara, R., & Saputri, B. A. (2025). *Penyiaran Publik di Era Digital: Etika, Praktik, dan Profesionalisme*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Setiarto, R. H. B., Karo, M. B., & Tambaip, T. (2021). *Penanganan Virus Hiv/Aids*. Deepublish.
- Solihin, O., Sos, S., Kom, M. I., & Abdullah, A. Z. (2023). *Komunikasi kesehatan era digital: Teori dan praktik*. Prenada Media.
- Sumartono, S. (2025). *Manajemen Komunikasi Krisis*. Alinea Indonesia.
- Wibisono, I. (2021). *Analisis Framing dalam Berita Politik*. CV. Amerta Media.

JURNAL

- Anam, K., Irwadi, D., & Salsabila, Z. Z. (2024). Hubungan Kadar CD4 Dengan Kadar Hemoglobin Pada Penderita HIV/AIDS yang Menjalani Terapi Antiretroviral Rutin di Rsud Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda. *Jurnal Teknologi Laboratorium Medik Borneo*, 4(2), 37–45.
- Ardhana, W., Sihombing, A., Napitupulu, P., Ginting, D. R. B., Harahap, N. S., Mandrofa, E. M. Y., Manurung, R., & Annisa, S. (2025). Media Sosial Dan Opini Publik: Agenda Setting, Framing, Dan Hegemoni Di Era Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(9), 16696.
- Bachtiar, E. E., Unde, A. A., & Bahfiarti, T. (2025). Strategi Komunikasi Persuasif Penyuluh Pertanian dalam Pemanfaatan Media Internet untuk Diseminasi Informasi pada Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Triton*, 16(1), 15–26.
- Darmawan, D., Rakhmania, S. K., Sampeangin, H., Budiarta, P. B. P. P., Akbar, M. T., Montolalu, I. A., Feriyanti, A., Akib, N., Sidabalok, S. R. D. B., & Fikri, M. (2025). *Promosi Kesehatan*. CV. Edu Akademi.

- Djurkalem, M., Tamaela, J., Soplanit, C., Souhaly, F., & Nifmaskossu, E. (2021). KOMUNIKASI KESEHATAN DI PLATFORM DIGITAL: ANALISIS SISTEMATIS EFEKTIVITAS PENYEBARAN INFORMASI MEDIS MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL BADATI*, 3(2), 160–180.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori agenda setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Farisal, U., Widiyanarti, T., Sianturi, M. K., Ningrum, A. J., Fatimah, Y., Hastuti, P. D., Abdilah, A., & Desmonda, W. K. (2024). Menghubungkan Dunia: Peran Media Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Budaya. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(4), 10.
- Feni Evi Andini, F. (2022). *ANALISIS DIFUSI INOVASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM MEMBENTUK GENERASI YANG BERKUALITAS MELALUI DUTA GENRE RIAU* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Harivarman, D. (2017). Hambatan komunikasi internal di organisasi pemerintahan. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 508–519.
- Harmita, D., Ibrahim, K., & Rahayu, U. (2022). Penggunaan media sosial terhadap pencegahan penyebaran hiv/aids. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 740–749.
- Kristiani, S. K. M., Arifin, S., & Adi Nugroho, S. K. M. (2025). *Dukungan dan harapan: Kunci pencegahan HIV-AIDS*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Meilani, M. (2014). Berbudaya melalui media digital. *Humaniora*, 5(2), 1009–1014.
- Melliasari, H., Dwiyo, I., Purwadhi, P., & Widjaya, Y. R. (2024). Digital leadership skill dan peranannya bagi kepemimpinan institusi pelayanan kesehatan di era digital. *Syntax Idea*, 6(9), 4055–4063.
- Mulyana, D. R. D. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Lkis Pelangi Aksara.
- Murdianti, W. (2024). Inovasi Media Pembelajaran Digital untuk Meningkatkan Minat Belajar di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13200–13212.
- Natalia, M. (2017). Agenda Setting Berita Pedofilia Di Samarinda Pos. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 283–295.
- Rachmawati, F. (2023). Strategi Humas Pemerintah Dalam Pengelolaan Managemen Isu Di Era Post Truth. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 114–127.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Simbolika Research and Learning In Communication Study*, 4(1), 32–41.